

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia sejak dekade 1990-an hingga sekarang mengalami pergeseran dari rencana pengembangan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para pengambil kebijakan kota. Pembangunan kota sering dicerminkan oleh perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan infrastruktur perkotaan.

Perkembangan kota membutuhkan ruang sebagai tempat hidup penduduk dengan aktivitasnya. Pertambahan jumlah penduduk kota berarti juga peningkatan kebutuhan ruang. Karena ruang tidak dapat bertambah, maka yang terjadi adalah perubahan penggunaan lahan, yang cenderung menurunkan proporsi lahan-lahan yang sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau. Tak terkecuali DKI Jakarta yang mengalami pembangunan fisik yang cukup pesat menjadikannya sebagai pusat berlangsungnya berbagai kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya adalah laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang meningkat terutama dari arus urbanisasi. Hingga tahun 2005 laju pertumbuhan penduduk Jakarta mencapai 1,52 % (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2006). Pertumbuhan populasi penduduk Jakarta yang tinggi membutuhkan pemenuhan akan permukiman, sarana dan prasarana kehidupan penduduk kota yang layak.

Berdasarkan RUTR 2005 proporsi lahan terbangun di kota Jakarta sangat tinggi ($\pm 46,053$ ha) dibandingkan penggunaan lahan tidak terbangun lainnya ($\pm 19,447$ ha) yang menunjukkan ciri perkotaan yang sangat kuat. Sebagian besar lahan terbangun didominasi oleh struktur dan fasilitas fisik, sosial, pendidikan dan ekonomi perkotaan seperti bangunan, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal), kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, utilitas, kawasan industri dan sarana prasarana lainnya yang tersebar hampir merata di seluruh DKI Jakarta.

Adapun lahan tidak terbangun umumnya merupakan ruang terbuka hijau (RTH) berbentuk:

- hijau lindung (cagar alam, hutan lindung dan hutan wisata)
- hijau binaan (hutan kota, taman kota, pemakaman, RTH fungsi pengamanan penghijauan pulau dan RTH budidaya pertanian)¹.

Pengembangan kawasan hijau menurut RTRW 2010 dan gambaran secara jelas mengenai kondisi eksisting dan target RTH DKI Jakarta dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

Tingginya tingkat pembangunan di daerah perkotaan, seringkali mengabaikan unsur-unsur alami seperti vegetasi. Padahal dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa vegetasi memiliki manfaat dan nilai untuk mempertahankan tingkat kenyamanan udara (Elsa, 2005). Bahkan pembangunan fisik kota itu sendiri mempengaruhi ketersediaan ruang untuk vegetasi dan distribusinya (Mc Pherson, 1997)

Akibatnya keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, berupa meningkatnya suhu udara perkotaan, pencemaran udara (karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksigen nitrogen, belerang dan debu), berkurangnya ruang resapan air, menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau genangan, intrusi air laut, serta meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah. Oleh sebab itu penting untuk disadari bahwa kondisi vegetasi di suatu daerah atau kawasan, sangat berpengaruh terhadap suhu udara.

Penetapan kawasan hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta semakin berkurang dan tidak pernah konsisten. Menurut Joga (2006), jauh sebelumnya Keputusan DPR Gotong Royong DKI Djakarta No. 9/P/DPR-GR/1967 yang menetapkan Rencana Induk Djakarta 1965-1985 telah menargetkan ruang terbuka hijau sebesar 37,2 persen (**sangat ideal**). Namun

¹ Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2000 – 2010 (Jakarta 2010), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1999.

kepentingan politik dan ekonomi telah memangkas target ruang terbuka hijau turun menjadi 25,85 persen (**cukup ideal**) dalam Perda DKI Jakarta No. 5/1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Perubahan peruntukan ruang terbuka hijau diulang kembali dalam Perda DKI Jakarta No. 6/1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2000-2010, dimana target RTH diturunkan menjadi 13,94 persen (**tidak ideal**), namun hingga sekarang kawasan hijau tersebut hanya sebesar 9,04 persen (**kritis**). Dengan demikian dalam kurun waktu 1965 – 2007 sudah puluhan ribu hektar ruang terbuka hijau diokupasi dan ratusan ribu pohon ditebang.

Padahal menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan mengharuskan luas kawasan hijau di perkotaan minimal 30 % dari seluruh luas perkotaan dan sesuai standar ideal kota sehat. Apabila mengacu pada Keputusan Menteri PU No. 378 Tahun 1987 dalam Joga (2006), menyebutkan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan kota yang sehat dan harmonis dibutuhkan ruang terbuka seluas 15 m²/penduduk. Bila penduduk Jakarta pada tahun 2010 diproyeksikan 12,5 juta jiwa, maka diperlukan RTH seluas 12,5 juta x 15 m² = 187.500.000 m² = 18.750 hektar atau sekitar 27,5 persen dari luas Jakarta (Supriatna, 2006:12). Sedangkan dalam Jakarta 2010 RTH hanya ditargetkan seluas 9.544,81 hektar dan hingga pertengahan tahun 2007 kawasan hijau yang dicapai hanya sekitar 7.513,01 hektar dari total luas kota Jakarta (66.152 hektar). Menurut Supriatna, jika tekanan penduduk semakin bertambah kuat dan tuntutan kebutuhan akan mobilitas dan permukiman semakin tinggi, maka pada 2010 kondisi Jakarta akan semakin gersang seiring dengan tingkat polusi dan kerusakan lingkungan fisik kota yang semakin tidak terkendali.

Penyusutan luasan RTH di DKI Jakarta terjadi disebabkan oleh berbagai faktor (Supriatna, 2006:13). **Pertama**, kepadatan penduduk yang tinggi di Jakarta sekitar 11,5 juta jiwa atau 175,6 jiwa/hektar. Hal ini menuntut kebutuhan infrastruktur dan utilitas kota semakin tinggi. Padahal sebagai perbandingan, laju pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan laju perkembangan luas RTH di Jakarta. **Kedua**, keberadaan RTH masih dikalahkan oleh kepentingan lain yang lebih ekonomis, seperti pembangunan sarana dan prasarana kota antara lain

gedung/pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, perumahan, dan sebagainya yang sering menggunakan lahan-lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik (taman kota dan jalur hijau). RTH sebagai ruang publik telah dikonversi menjadi infrastruktur kota. **Ketiga**, ketidakkonsistenan Pemda DKI dalam merencanakan dan mengelola tata ruang kota khususnya ruang publik, sehingga pengadaan RTH dilakukan secara parsial bukan terintegrasi dalam satu sistem. **Keempat**, keterbatasan lahan sehingga tidak seimbang dengan kebutuhan lahan untuk berbagai aktivitas kota, dan **Kelima**, kurang pedulinya warga kota terhadap manfaat dan fungsi keberadaan RTH.

Menurut hasil analisis dari beberapa penelitian mengungkapkan adanya dampak menguntungkan dari ruang hijau perkotaan pada iklim mikro, kualitas udara, reduksi konsumsi energi pada gedung-gedung yang berdekatan, penyimpanan karbon, dan juga memperkaya biodiversitas (Nowak, *et.al*, 2000). Diakui pula bahwa terdapat keuntungan sosial ekonomi yang dapat diperoleh dari ruang hijau perkotaan, dan kontribusinya pada perbaikan kesehatan manusia. Selain itu perubahan iklim juga dapat mempengaruhi fungsi dan struktur ruang hijau, yang akhirnya berdampak pada lingkungan perkotaan.

Mengantisipasi penyusutan luasan dan fungsi RTH di DKI Jakarta antara lain dilakukan dengan pemanfaatan RTH Binaan melalui RTH yang menyerupai alamnya (budidaya). Salah satunya dengan pengelolaan aset kebun-kebun milik Pemda DKI Jakarta. Menurut RTRW DKI Jakarta 2010, kebun bibit merupakan bagian dari ruang terbuka hijau DKI Jakarta yang memiliki banyak fungsi dan nilai sebagai bagian dari sarana perkotaan. Sarana tersebut merupakan faktor penyempurna dari kepentingan atau keberadaan suatu kota dalam melayani warganya. Terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan ketersediaan pohon (tanaman) sebagai bagian dari estetika dan penghijauan kota.

Pemda DKI Jakarta memiliki aset lahan kebun bibit seluas 134,02 ha yang terletak di 22 lokasi dan tersebar di 4 (empat) wilayah kotamadya DKI Jakarta (Selatan, Timur, Utara dan Barat) serta di Pulau Tidung Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Kebun-kebun bibit tersebut dikelola oleh dua Instansi yaitu,

Dinas Pertanian dan Kehutanan mengelola lahan kebun bibit seluas 114,22 ha di 19 lokasi dan Dinas Pertamanan seluas 19,8 ha di 3 lokasi wilayah DKI Jakarta.

Kebun bibit merupakan unsur ruang terbuka hijau binaan yang tergolong produktif atau menghasilkan seperti tanaman buah, tanaman hias, anggrek, tanaman pelindung dan tanaman perdu. Kebun bibit memiliki nilai ekonomis, ekologis, dan sosial. Nilai ekonomis kebun bibit dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui penjualan hasil kebun berupa bibit tanaman buah, tanaman hias, anggrek dan penyewaan lahan kebun. Adapun nilai ekologisnya antara lain sebagai produsen oksigen, penghasil iklim mikro, pengendali pencemaran udara dan sebagai produsen serta pengendali air tanah. Sedangkan nilai sosialnya berupa pemberian bibit tanaman buah, tanaman hias, anggrek dan pelayanan informasi serta teknologi tentang budidaya tanaman bagi masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan nilai kebun bibit, telah dilakukan revitalisasi fasilitas (sarana dan prasarana) penunjang seperti bangunan, perlengkapan/peralatan, kondisi tanah, vegetasi, dan sebagainya. Namun kondisi tersebut belum dapat meningkatkan hasil tanaman (pohon) yang diharapkan seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana kebun bibit tersebut. Terbatasnya pengelolaan kebun bibit menjadikan daya guna, hasil maupun produktivitas yang didapatkan belum optimal sehingga pembiayaan yang dibutuhkan baik dalam menjalankan operasional maupun pemeliharaan masih didukung sepenuhnya dari APBD DKI Jakarta (*cost oriented*).

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan keefisienan dan keefektifan pendayagunaan dan pengelolaan kebun bibit dimaksud, dimana hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil topik penelitian tersebut, maka perlu dilihat efektifitas pengaruh pembangunan atau perbaikan fasilitas penunjang kebun bibit terhadap nilai produktivitasnya. Selanjutnya manfaat atau dampak yang ditimbulkannya sebagai salah satu aset RTH pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mengisi dan mempertimbangkan kebutuhan ruang hijau di perkotaan.

1.2. Perumusan Masalah

Pesatnya kegiatan pembangunan fisik kota, telah menggeser penggunaan lahan terbuka hijau menjadi gedung-gedung tinggi, perkantoran, kawasan bisnis, kawasan hiburan, prasarana transportasi, komunikasi, energi, properti, dan *real estate* di seluruh bagian kota Jakarta. Kondisi fisik wilayah demikian mengakibatkan semakin terbatasnya jumlah lahan yang tidak terbangun di Jakarta dan memperburuk kondisi lingkungan fisik perkotaan. Keberadaan lahan terbuka hijau semakin terus menyempit, sehingga membawa konsekuensi bagi keseimbangan ekosistem, ekologi tata ruang dan kesehatan lingkungan kota Jakarta.

Keadaan demikian membuat potensi dan investasi ruang terbuka hijau (RTH) DKI Jakarta semakin menurun baik secara kuantitas maupun kualitas. Kritis RTH menjadi ruang tanpa hijau semakin bertambah jumlahnya karena Pemda DKI sulit mencari lahan pengganti. Menurut Carpenter dan Walker (1975) dalam Branch (1985), bahwa permukiman kota berhadapan dengan permasalahan penggunaan lahan yang sangat padat disebabkan mahalnya lahan dan ruang yang terbatas. Kesulitan mencari lahan pengganti tersebut disebabkan semakin tingginya harga lahan/tanah, rendahnya tingkat kepedulian warga terhadap fungsi RTH bagi kehidupan komunitas kota dan adanya pemahaman arti RTH sebagai *collective goods* yaitu barang yang dikonsumsi oleh banyak orang, tidak ekonomis dan sulit dikelola.

Pengembangan RTH merupakan keharusan yang tidak dapat ditoleransi. Setiap kawasan yang sudah ditetapkan peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau seperti lahan kebun pembibitan sebaiknya ditetapkan dengan peraturan daerah untuk menghindari konversi lahan atau peruntukan yang tidak sesuai di masa yang akan datang. Upaya ini dimaksudkan untuk menertibkan pembangunan yang disebut sebagai dasar politik perencanaan suatu kota (Catanese dan Snyder, 1989 dalam Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta kerjasama Fakultas Kehutanan IPB, 2004), .

Kebun bibit sebagai kawasan terbuka hijau seharusnya dapat berfungsi dan bermanfaat dalam pengembangan RTH DKI Jakarta yang semakin sedikit. Kebun

bibit dapat menjadi penyuplai dan penyedia stok tanaman bagi kawasan terbuka hijau di DKI Jakarta. Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI telah melakukan upaya peningkatan fungsi kebun bibit yang dikelolanya dengan pembangunan atau perbaikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional kebun bibit. Namun demikian kebun-kebun bibit tersebut belum mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Produksi tanaman yang dihasilkan belum memenuhi target yang ditetapkan, pengadaan fasilitas pendukung operasional belum efisien, efektifitas kinerja kebun bibit belum sesuai dengan kapasitas aset yang dimiliki masing-masing kebun bibit. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk revitalisasi fasilitas fisik kebun sampai saat ini masih dianggap sebagai pengeluaran rutin (*expenses*) dan belum diperlakukan sebagai investasi pengembangan ke depannya. Sehingga berbagai investasi pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kebun belum teroptimalkan. Konsekuensinya, pemanfaatan untuk pengembangan kebun bibit belum menghasilkan produktivitas yang maksimal.

Belum adanya prinsip-prinsip ekonomis dalam pengelolaannya membuat fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di kebun bibit tersebut belum efisien dan termanfaatkan secara maksimal baik dalam melayani masyarakat maupun sebagai pemasukan berupa retribusi bagi PAD DKI Jakarta. Padahal potensi dan keberadaan lokasi beberapa kebun bibit cukup strategis. Disamping itu, keberadaan aset kebun-kebun bibit tersebut memiliki potensi sebagai ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang harus tetap dipertahankan dan dikembangkan karena nilai/manfaat ekologisnya dirasakan hingga masa yang akan datang. Implikasi pemanfaatan dan pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai manfaat yang seimbang dengan nilai *intrinsic* dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dapat diformulasikan dalam bentuk **pertanyaan penelitian (*research questions*)** sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh revitalisasi fasilitas fisik atau penunjang kebun bibit terhadap tingkat produktivitasnya ?

- b. Bagaimana preferensi masyarakat dalam mempertahankan manfaat ekologis kebun bibit sebagai kawasan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang tergabung sebagai kegiatan revitalisasi fasilitas fisik atau penunjang kebun yang mempengaruhi produktivitas kebun bibit.
- b. Mengetahui preferensi masyarakat dalam mempertahankan manfaat ekologis kebun bibit sebagai kawasan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan gambaran dan hasil yang lebih jelas serta objektif tentang kondisi eksisting dan kinerja pengelolaan aset kebun bibit secara *holistic* dan terpadu, serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pemanfaatan kebun-kebun bibit tersebut bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta khususnya UPT Balai Benih Induk selaku pihak pengelola aset kebun bibit dan Pemda DKI Jakarta umumnya selaku pemilik aset lahan tersebut.
- b. Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, akademisi dan *stake holder* dalam pemanfaatan dan pengelolaan RTH (aset lahan kebun bibit) secara ekologis,
- c. Memberikan informasi bagi masyarakat secara luas mengenai pengelolaan dan manfaat RTH (kebun bibit) bagi lingkungan fisik perkotaan.
- d. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1. Lingkup Wilayah Penelitian

Lingkup wilayah penelitian yang dilakukan adalah meliputi 14 lokasi (tapak) lahan kebun bibit yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan

Provinsi DKI Jakarta dan peruntukannya sebagai lahan kebun bibit yang terletak di beberapa lokasi berikut :

▪ **Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan:**

- a. Kebun Bibit Ragunan di Kel. Ragunan, Kec. Pasarminggu.
- b. Kebun Bibit Ciganjur di Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa.
- c. Kebun Bibit Petukangan Utara di Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan
- d. Kebun Bibit Lebak Bulus di Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak.

▪ **Wilayah Kotamadya Jakarta Barat:**

- e. Kebun Bibit Kembangan di Kel. Kembangan, Kec. Kembangan.
- f. Kebun Bibit Cengkareng di Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng.

▪ **Wilayah Kotamadya Jakarta Timur:**

- g. Kebun Bibit Cilangkap di Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung.
- h. Kebun Bibit Agrowisata Cibubur di Kec. Ciracas.
- i. Kebun Bibit Cibubur di Kel. Cibubur, Kec. Ciracas.
- j. Kebun Bibit Kelapa Dua Wetan di Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas.
- k. Kebun Bibit Ujung Menteng di Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung.
- l. Kebun Bibit Kehutanan Cibubur di Kel. Cibubur, Kec. Ciracas.

▪ **Wilayah Kotamadya Jakarta Utara:**

- m. Kebun Bibit Kamal Muara di Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan.
- n. Kebun Bibit Sukapura di Kel. Rorotan, Kec. Cilincing.

1.5.2. Lingkup Materi

Lingkup materi penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan elemen atau unsur yang merupakan kegiatan revitalisasi fasilitas fisik atau penunjang kebun sebagai variabel yang akan mempengaruhi tingkat produktivitas kebun.
- b. Menganalisis pengaruh kegiatan revitalisasi fasilitas penunjang yang mendukung operasional kebun ditinjau dari aspek fisik meliputi aspek *site/*

tapak/lokasi (pengurugan, pemagaran, jalan setapak), bangunan/gedung (green house, lathhouse, sere), mesin/peralatan (sprinkle dan deep well) dan vegetasi. Analisis ini akan menentukan sejauhmana pengaruh dan signifikansi aspek-aspek tersebut terhadap tingkat produktivitas kebun.

- c. Preferensi masyarakat ditentukan dengan menilai kesediaan berkorban atau membayar dalam mempertahankan keberadaan dan fungsi kebun bibit sebagai kawasan terbuka hijau bagi masyarakat di kawasan sekitarnya. Penilaian preferensi dilakukan dengan pendekatan *willingness to pay* dalam melihat nilai kesediaan membayar yang diberikan masyarakat terhadap kebun bibit tersebut.

1.6. Batasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, materi penelitian dibatasi dengan pengertian berikut:

- **Revitalisasi kebun** adalah upaya mendayagunakan kembali pemanfaatan lahan kebun sesuai fungsi dan peruntukannya sebagai kawasan yang dilestarikan (*preserved*), dengan penambahan atau pengurangan elemen-elemennya agar memberikan vitalitas baru yang memiliki kemampuan untuk menampung kegiatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masa kini.
- **Revitalisasi fasilitas fisik kebun** dimaksudkan adalah tindakan memvitalkan kembali pemanfaatan lahan kebun dengan pembangunan, pengadaan dan perbaikan fasilitas fisik penunjang (sarana dan prasarana terbangun/tersedia) yaitu bagian-bagian tapak tanah, bangunan, peralatan/perlengkapan, dan vegetasi.
- **Produktivitas kebun** dimaksudkan sebagai kemampuan kebun bibit dalam menghasilkan atau memproduksi bibit tanaman per hektar oleh setiap kebun bibit pada tahun yang telah ditentukan (**dalam satuan pohon/ha**).
- **Preferensi** dimaksudkan adalah menentukan kesediaan membayar nilai jasa lingkungan (*intangible asset*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempertahankan keberadaan dan fungsi kebun bibit sebagai kawasan RTH DKI Jakarta.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

1. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, pernyataan penelitian (*research questions*), tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup, batasan penelitian, sistematika penulisan dan tahapan penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan studi literatur yang digunakan, kerangka teori dan hipotesis kerja yang digunakan dalam memandu/menuntun hasil pelaksanaan penelitian.

3. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Pada bab ini digambarkan keadaan umum wilayah penelitian yang meliputi kondisi umum pengelolaan kebun bibit, distribusi, ukuran, jenis tanaman yang diusahakan, fasilitas sarana dan prasarana kebun bibit, karakteristik wilayah dan pemanfaatan ruang kebun serta perkembangan peruntukan lahan di masing-masing wilayah.

4. Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai desain penelitian, teknik sampling dan sampel, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang digunakan.

5. Analisis Hasil

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil pengolahan data dan analisis data yang digunakan.

6. Pembahasan

Pembahasan terhadap hasil analisa data yang diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian.

7. Kesimpulan dan Implikasi

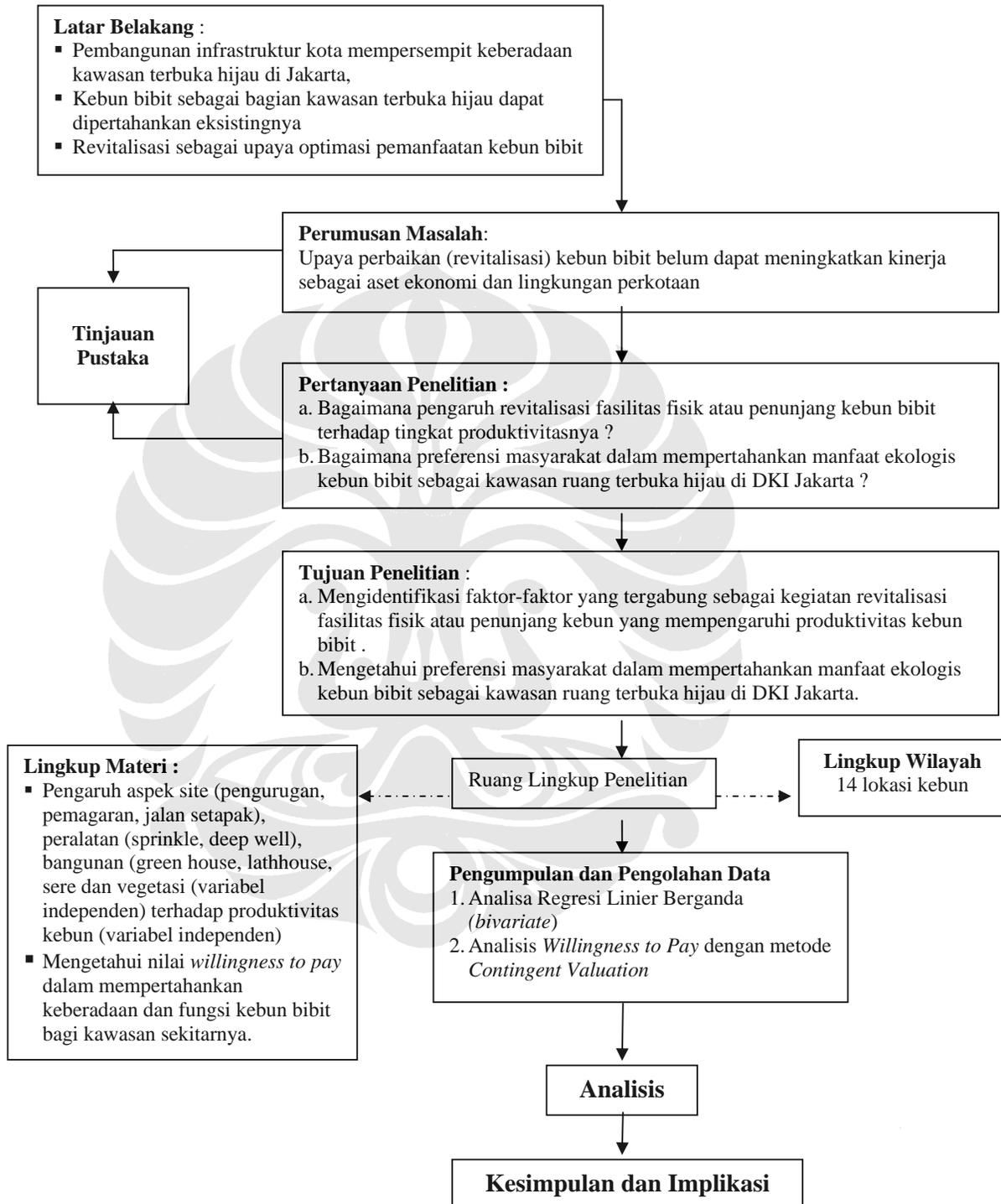
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil pelaksanaan penelitian, saran-saran dan implikasi yang dapat dipertimbangkan.

Daftar Referensi

Lampiran

1.8. Tahapan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penelitian